

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Implementasi e-government melalui pemanfaatan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Pegayaman telah membawa perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan desa, di mana digitalisasi pelayanan publik membuat proses administrasi menjadi lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Perangkat desa kini dapat mengelola data kependudukan dan layanan administrasi dengan lebih cepat dan akurat, sehingga kualitas pelayanan publik meningkat. Transformasi digital ini juga mendukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) perangkat desa melalui pelatihan dan kolaborasi. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait literasi digital masyarakat dan infrastruktur teknologi yang belum merata. Pemerintah desa berusaha mengatasi kendala ini dengan menyediakan pelayanan manual sebagai alternatif dan mengadakan sosialisasi serta pelatihan. Keberhasilan implementasi e-government bergantung pada kolaborasi antara perangkat desa dan masyarakat, peningkatan kompetensi SDM, serta dukungan fasilitas teknologi yang memadai, sehingga Desa Pegayaman berpotensi menjadi contoh desa digital yang mewujudkan pelayanan publik modern dan responsif di era Society 5.0.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat

menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa, serta masyarakat dalam implementasi e-government dalam pengembangan SDM desa Pegayaman :

1. Sosialisasi Layanan Digital yang Lebih Intensif

Perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif dan terstruktur mengenai manfaat serta tata cara penggunaan layanan digital desa. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti pertemuan warga, pamflet, media sosial, maupun kunjungan langsung ke rumah-rumah warga, agar seluruh lapisan masyarakat—termasuk kelompok usia lanjut—dapat memahami dan memanfaatkan layanan digital.

2. Penguatan Infrastruktur Teknologi Informasi

Pemerintah desa perlu memprioritaskan penguatan infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat komputer yang memadai. Dengan infrastruktur yang baik, akses terhadap layanan digital akan semakin mudah dan merata di seluruh wilayah desa.

3. Kolaborasi dan Berbagi Praktik Terbaik Antar Desa

Pemerintah desa sebaiknya aktif membangun kolaborasi dan jaringan dengan desa-desa lain yang telah berhasil dalam implementasi e-government. Melalui forum sharing, studi banding, atau diskusi kelompok, perangkat desa dapat saling bertukar pengalaman dan mengadopsi praktik-praktik terbaik yang relevan untuk kemajuan desa.

4. Evaluasi dan Monitoring Berkala

Diperlukan evaluasi dan monitoring secara rutin terhadap pelaksanaan e-government di desa. Dengan evaluasi berkala, pemerintah desa dapat mengidentifikasi kendala atau hambatan yang muncul di lapangan dan segera merumuskan solusi yang tepat, sehingga pengembangan SDM dan pelayanan publik berbasis digital dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan.